WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/212/M.SM.04.00/2020 Tanggal 24 Februari 2020 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat

Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.

7. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan (*job value*) dan kelas jabatan (*job class*).

8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

9. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain.

10. Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat ini.

BAB II

KELAS JABATAN

Pasal 2

(1) Kelas Jabatan disusun melalui proses Evaluasi Jabatan.

(2) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana ayat (1) berupa:
   a. nilai jabatan dan kelas jabatan struktural yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas; dan
   b. nilai jabatan dan kelas jabatan untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 3

(1) Kelas dan Nilai Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Kelas dan Nilai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Kelas dan Nilai Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 4

(1) Kelas Jabatan ASN yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan jika ada:
   a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
   b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; atau
   c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan.

(2) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan Informasi Faktor Jabatan yang memuat:
   a. nama jabatan;
   b. peran jabatan;
   c. uraian tugas dan tanggung jawab;
   d. hasil kerja jabatan;
   e. tingkat faktor; dan
   f. persyaratan jabatan tertentu.

(4) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Desember 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 71

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 71 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020
TENTANG : KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

KELAS DAN NILAI JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

NO	JABATAN PIMPINAN TINGGI	KELAS	NILAI JABATAN
1.	Sekretaris Daerah	15	3555
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	3030
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	3030
4.	Asisten Administrasi Umum	14	3030
5.	Sekretaris DPRD	14	2865
6.	Inspektur	14	3030
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	2865
8.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	2865
9.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	2865
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	2865
11.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14	2865
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	2865
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	2865
14.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	14	2865
15.	Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	14	2865
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	2865
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	2865
18.	Kepala Dinas Pariwisata	14	2865
19.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	2865
20.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	14	2865
21.	Kepala Dinas Perhubungan	14	2865
22.	Kepala Badan Keuangan Daerah	14	3030
23.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	14	3030
24.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan	14	2865

	SDM Daerah		
25.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	2865
26.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	2865
27.	Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan	13	2715
28.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	13	2715
29.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	13	2715
30.	Kepala Bagian Pemerintahan	12	2315
31.	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	12	2315
32.	Kepala Bagian Hukum	12	2315
33.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	12	2315
34.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	12	2315
35.	Kepala Bagian Humas dan Protokol	12	2315
36.	Kepala Bagian Umum	12	2315
37.	Kepala Bagian Organisasi	12	2315
38.	Kepala Bagian Perlengkapan	12	2315
39.	Sekretaris Inspektur	12	2140
40.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	2115
41.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	2115
42.	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	2115
43.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	2115
44.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12	2115
45.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12	2115
46.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu	12	2115
47.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	12	2115
48.	Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	12	2115
49.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	2115
50.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	12	2115
51.	Sekretaris Dinas Pariwisata	12	2115
52.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	2115
53.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	12	2115
54.	Sekretaris Dinas Perhubungan	12	2115
55.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	12	2140
56.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	12	2140
57.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	12	2115

58.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	2115
59.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	2115
60.	Camat Rangkui	12	2315
61.	Camat Gerunggang	12	2315
62.	Camat Bukit Intan	12	2315
63.	Camat Gabek	12	2315
64.	Camat Pangkalbalam	12	2315
65.	Camat Taman Sari	12	2315
66.	Camat Girimaya	12	2315
67.	Kepala Bagian Umum	11	2090
68.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	11	2090
69.	Kepala Bagian Keuangan	11	2090
70.	Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Aset	11	1990
71.	Inspektur Pembantu II Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	11	1990
72.	Inspektur Pembantu III Bidang Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan	11	1990
73.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal	11	2045
74.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	11	2045
75.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	11	2045
76.	Kepala Bidang Kebudayaan	11	2045
77.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	11	2045
78.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	11	2045
79.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	11	2045
80.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	2045
81.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	2045
82.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	2045
83.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	11	2045
84.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	2045
85.	Kepala Bagian Tata Usaha	11	2045
86.	Kepala Bidang Keperawatan	11	2045
87.	Kepala Bidang Pelayanan Medik	11	2045
88.	Kepala Bidang Bina Marga	11	2045
89.	Kepala Bidang Cipta Karya	11	2045
90.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	11	2045
91.	Kepala Bidang Tata Ruang	11	2045
92.	Kepala Bidang Pertanahan	11	2045
93.	Kepala Bidang Perumahan	11	2045
94.	Kepala Bidang Permukiman	11	2045
95.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan	11	2045

	Daerah		
96.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11	2045
97.	Kepala Bidang Sumber Daya dan LINMAS	11	2045
98.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	11	2045
99.	Kepala Bidang Penanaman Modal	11	2045
100.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian	11	2045
101.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	11	2045
102.	Kepala Bidang Ketenagakerjaan	11	2045
103.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	11	2045
104.	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura	11	2045
105.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	2045
106.	Kepala Bidang Perikanan	11	2045
107.	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	11	2045
108.	Kepala Bidang Perdagangan	11	2045
109.	Kepala Bidang Metrologi	11	2045
110.	Kepala Bidang Perindustrian	11	2045
111.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11	2045
112.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	2045
113.	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	11	2045
114.	Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH	11	2045
115.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	11	2045
116.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	11	2045
117.	Kepala Bidang Pariwisata	11	2045
118.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	11	2045
119.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	11	2045
120.	Kepala Bidang Perpustakaan	11	2045
121.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	11	2045
122.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	11	2045
123.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	11	2045
124.	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government	11	2045
125.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	11	2045
126.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	11	2045
127.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Jalan	11	2045
128.	Kepala Bidang Anggaran	11	2045
129.	Kepala Bidang Perbendaharaan	11	2045
130.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	11	2045
131.	Kepala Bidang Pendapatan	11	2045
132.	Kepala Bidang Aset	11	2045
133.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan LITBANG	11	2045

134.	Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan	11	2045

135.	Kepala Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, SDA dan Lingkungan Hidup	11	2045
136.	Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	11	2045
137.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data	11	2045
138.	Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan	11	2045
139.	Kepala Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik	11	2045
140.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	11	2045
141.	Kepala Bidang Pembinaan Politik	11	2045
142.	Sekretaris Kecamatan Rangkui	11	2090
143.	Sekretaris Kecamatan Gerunggang	11	2090
144.	Sekretaris Kecamatan Bukit Intan	11	2090
145.	Sekretaris Kecamatan Gabek	11	2090
146.	Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam	11	2090
147.	Sekretaris Kecamatan Taman Sari	11	2090
148.	Sekretaris Kecamatan Girimaya	11	2090
149.	Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, Kerjasama Antar Daerah dan LN	9	1430
150.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Keagamaan	9	1430
151.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan	9	1430
152.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia	9	1430
153.	Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	9	1430
154.	Kepala Sub Bagian Administrasi Perekonomian	9	1430
155.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	9	1430
156.	Kepala Sub Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Kerjasama Pers	9	1430
157.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pelayanan Informasi	9	1430
158.	Kepala Sub Bagian Protokol	9	1430
159.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
160.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan	9	1430
161.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan	9	1430
162.	Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan	9	1430
163.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
164.	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	9	1430
165.	Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah	9	1430

166.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan	9	1430
167.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi	9	1430
168.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan	9	1430
169.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	9	1430
170.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi	9	1430
171.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
172.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
173.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	1430
174.	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9	1430
175.	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal	9	1430
176.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	9	1430
177.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	9	1430
178.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	9	1430
179.	Kepala Seksi Data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	9	1430
180.	Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar	9	1430
181.	Kepala Seksi PTK PAUD, Pendidikan Non Formal dan Tenaga Kebudayaan	9	1430
182.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
183.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
184.	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	9	1430
185.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Anak dan Lansia	9	1430
186.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Penyalahgunaan NAPZA	9	1430
187.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	9	1430
188.	Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	9	1430
189.	Kepala Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan	9	1430
190.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	9	1430
191.	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan	9	1430
192.	Kepala Seksi Perlindungan Anak	9	1430
193.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
194.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
195.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	1430
196.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	9	1430
197.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	9	1430
198.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	9	1430
199.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan	9	1430

200.	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	9	1430
201.	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan	9	1430
202.	Kepala UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	9	1430
203.	Kepala UPTD Puskesmas Selindung	9	1430
204.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
205.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
206.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	9	1430
207.	Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan	9	1430
208.	Kepala Seksi Pelayanan Medik	9	1430
209.	Kepala Seksi Penunjang Medik	9	1430
210.	Kepala Seksi Rekam Medis	9	1430
211.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
212.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	9	1430
213.	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	9	1430
214.	Kepala Seksi Pengembangan Jalan dan Jembatan	9	1430
215.	Kepala Seksi Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan	9	1430
216.	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air (SDA)	9	1430
217.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang	9	1430
218.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
219.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	9	1430
220.	Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Perumahan	9	1430
221.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	9	1430
222.	Kepala UPTD Pengelola Rusunawa	9	1430
223.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
224.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	1430
225.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	9	1430
226.	Kepala Seksi Operasi Pengendalian	9	1430
227.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
228.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
229.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	1430
230.	Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah	9	1430
231.	Kepala Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi	9	1430
232.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I	9	1430
233.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III	9	1430
234.	Kepala Seksi Perluasan, Pelatihan dan Produktivitas	9	1430

	Tenaga Kerja		
235.	Kepala Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	9	1430
236.	Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9	1430
237.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
238.	Kepala Seksi Ketersediaan dan Retribusi Pangan	9	1430
239.	Kepala Seksi Prasarana Sarana dan Penyuluhan	9	1430
240.	Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi	9	1430
241.	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	9	1430
242.	Kepala Seksi KESMAVET, Pengolahan dan Pemasaran	9	1430
243.	Kepala Seksi Perikanan Tangkap	9	1430
244.	Kepala Seksi Perikanan Budidaya	9	1430
245.	Kepala Seksi Usaha Perikanan	9	1430
246.	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan	9	1430
247.	Kepala UPTD Pembibitan	9	1430
248.	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan	9	1430
249.	Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan	9	1430
250.	Kepala UPTD Balai Benih Ikan Lokal	9	1430
251.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
252.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan	9	1430
253.	Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan dan Ekspor	9	1430
254.	Kepala Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang	9	1430
255.	Kepala Seksi Pengawasan Kemetrologian	9	1430
256.	Kepala Seksi Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal	9	1430
257.	Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri	9	1430
258.	Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	9	1430
259.	Kepala Seksi Pemberdayaan Industri dan Dokumen Pendukung	9	1430
260.	Kepala UPTD Pasar	9	1430
261.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
262.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	9	1430
263.	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	9	1430
264.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	9	1430
265.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
266.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	9	1430
267.	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah	9	1430
268.	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	9	1430
269.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	9	1430
270.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
271.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	9	1430

272.	Kepala Seksi Destinasi Pariwisata	9	1430
273.	Kepala Seksi Kelembagaan	9	1430
274.	Kepala Seksi Industri Pariwisata	9	1430
275.	Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga	9	1430
276.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
277.	Kepala Seksi Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	9	1430
278.	Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	9	1430
279.	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis	9	1430
280.	Kepala Seksi Akuisisi, Pengelolaan dan Preservasi Arsip Statis	9	1430
281.	Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis	9	1430
282.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
283.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi	9	1430
284.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi	9	1430
285.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian	9	1430
286.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
287.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	9	1430
288.	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	9	1430
289.	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan	9	1430
290.	Kepala Seksi Terminal dan Angkutan	9	1430
291.	Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan	9	1430
292.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
293.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
294.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	9	1430
295.	Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran	9	1430
296.	Kepala Seksi Penatausahaan Pengeluaran	9	1430
297.	Kepala Seksi Penatausahaan Kas Daerah	9	1430
298.	Kepala Seksi Pengendalian Belanja	9	1430
299.	Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan	9	1430
300.	Kepala Seksi Pelaporan Keuangan Daerah	9	1430
301.	Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	9	1430
302.	Kepala Seksi Penagihan dan Evaluasi Pajak Daerah	9	1430
303.	Kepala Seksi Piutang dan Pelaporan Pajak Daerah	9	1430
304.	Kepala Seksi Penatausahaan Aset	9	1430
305.	Kepala Seksi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset	9	1430
306.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	9	1430
307.	Kepala Seksi Perencanaan	9	1430
308.	Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi	9	1430
309.	Kepala Seksi Infrastruktur	9	1430
310.	Kepala Seksi Pengembangan Wilayah	9	1430

311.	Kepala Seksi SDA dan Lingkungan Hidup	9	1430
312.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
313.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	9	1430
314.	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan	9	1430
315.	Kepala Seksi Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai	9	1430
316.	Kepala Seksi Pengadaan dan Pengangkatan	9	1430
317.	Kepala Seksi Mutasi dan Pemberhentian	9	1430
318.	Kepala Seksi Perencanaan, Data dan Informasi	9	1430
319.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	9	1430
320.	Kepala Seksi Kedaruratan	9	1430
321.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
322.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
323.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	1430
324.	Kepala Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa	9	1430
325.	Kepala Sub Bidang Partisipasi Pelestarian Nilai-Nilai Kebangsaan	9	1430
326.	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pembinaan dan Politik Masyarakat	9	1430
327.	Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Infrastruktur Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik	9	1430
KECAMATAN RANGKUI			
328.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Rangkui	9	1455
329.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1455
KECAMATAN GERUNGGANG			
330.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1455
331.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	9	1455
332.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9	1455
333.	Kepala Seksi Pembangunan	9	1455
334.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1455
KECAMATAN BUKIT INTAN			
335.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1455
KECAMATAN GABEK			
336.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9	1455
337.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	9	1455
338.	Kepala Seksi Pembangunan	9	1455
339.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1455
KECAMATAN PANGKALBALAM			
340.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1455
341.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1455
KECAMATAN TAMAN SARI			
342.	Kepala Seksi Pembangunan	9	1455
343.	Lurah Masjid Jamik	9	1540

344.	Lurah Pintu Air	9	1540
345.	Lurah Asam	9	1540
346.	Lurah Keramat	9	1540
347.	Lurah Bintang	9	1540
348.	Lurah Melintang	9	1540
349.	Lurah Parit Lalang	9	1540
350.	Lurah Gajah Mada	9	1540
351.	Lurah Tua Tunu Indah	9	1540
352.	Lurah Bukit Merapin	9	1540
353.	Lurah Kacang Pedang	9	1540
354.	Lurah Bukit Sari	9	1540
355.	Lurah Taman Bunga	9	1540
356.	Lurah Kepala Tujuh	9	1540
357.	Lurah Air Hitam	9	1540
358.	Lurah Bacang	9	1540
359.	Lurah Semabung Lama	9	1540
360.	Lurah Pasir Putih	9	1540
361.	Lurah Temberan	9	1540
362.	Lurah Sinar Bulan	9	1540
363.	Lurah Air Mawar	9	1540
364.	Lurah Selindung	9	1540
365.	Lurah Selindung Baru	9	1540
366.	Lurah Gabek Satu	9	1540
367.	Lurah Gabek Dua	9	1540
368.	Lurah Air Salemba	9	1540
369.	Lurah Jerambah Gantung	9	1540
370.	Lurah Rejosari	9	1540
371.	Lurah Ketapang	9	1540
372.	Lurah Ampui	9	1540
373.	Lurah Pasir Garam	9	1540
374.	Lurah Lontong Pancur	9	1540
375.	Lurah Gedung Nasional	9	1540
376.	Lurah Kejaksaan	9	1540
377.	Lurah Batin Tikal	9	1540
378.	Lurah Rawa Bangun	9	1540
379.	Lurah Opas Indah	9	1540
380.	Lurah Pasar Padi	9	1540
381.	Lurah Batu Intan	9	1540
382.	Lurah Bukit Besar	9	1540
383.	Lurah Sriwijaya	9	1540
384.	Lurah Semabung Baru	9	1540
385.	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum	8	1295
386.	Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	8	1165
387.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	8	1295
388.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Sosial Kemasyarakatan	8	1295

389.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan	8	1165
390.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	8	1165
391.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	8	1295
392.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	8	1165
393.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	8	1295
394.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	8	1295
395.	Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan	8	1295
396.	Kepala Sub Bagian Perawatan dan Pemeliharaan	8	1295
397.	Kepala Sub Bagian Inventarisasi	8	1295
398.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal	8	1295
399.	Kepala Seksi Nilai Budaya dan Permuseuman	8	1295
400.	Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi	8	1295
401.	Kepala Seksi Kesenian dan Perfilman	8	1295
402.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	8	1165
403.	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	8	1295
404.	Kepala Seksi Jaminan Sosial	8	1165
405.	Kepala Seksi Pengkajian Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender	8	1295
406.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	8	1295
407.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	8	1295
408.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	8	1295
409.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	8	1165
410.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	8	1165
411.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penggerakan Penduduk	8	1295
412.	Kepala Seksi Keluarga Berencana	8	1295
413.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Kesehatan	8	1165
414.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	8	1295
415.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas Air Hitam	8	1295
416.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Girimaya	8	1295
417.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas Pangkalbalam	8	1295
418.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas Selindung	8	1165
419.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD	8	1165

	Puskesmas Taman Sari		
420.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas Gerunggang	8	1295
421.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas Kacang Pedang	8	1165
422.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas Melintang	8	1165
423.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas Pasir Putih	8	1165
424.	Kepala Seksi Pelayanan ASKEP	8	1295
425.	Kepala Seksi DIKLAT dan Pengembangan SDM	8	1295
426.	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8	1295
427.	Kepala Seksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	8	1165
428.	Kepala Seksi Bina Konstruksi	8	1165
429.	Kepala Seksi Penatagunaan Air Baku	8	1295
430.	Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air (SDA)	8	1295
431.	Kepala Seksi Pemetaan	8	1165
432.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	8	1165
433.	Kepala Seksi Pendataan dan Penguasaan Tanah	8	1295
434.	Kepala Seksi Survey dan Pengukuran	8	1295
435.	Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Tanah	8	1165
436.	Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh	8	1295
437.	Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Utilitas Dasar	8	1295
438.	Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Permukiman Kumuh	8	1295
439.	Kepala Seksi Penataan Taman dan Perkuburan	8	1295
440.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada UPTD Pengelola RUSUNAWA	8	1295
441.	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1295
442.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan	8	1295
443.	Kepala Seksi Penyuluhan	8	1165
444.	Kepala Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	8	1295
445.	Kepala Seksi Kerjasama Masyarakat	8	1295
446.	Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya	8	1295
447.	Kepala Seksi Operasi LINMAS	8	1295
448.	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	8	1295
449.	Kepala Seksi Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran	8	1295
450.	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran	8	1295
451.	Kepala Seksi Pelatihan Sumber Daya Kebakaran	8	1165
452.	Kepala Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman	8	1165

	Modal		
453.	Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal	8	1165
454.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	8	1165
455.	Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan	8	1165
456.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	8	1295
457.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1295
458.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	8	1165
459.	Kepala Seksi Konsumsi Pangan	8	1165
460.	Kepala Seksi Keamanan Pangan	8	1165
461.	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan	8	1295
462.	Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran	8	1295
463.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Rumah Potong Hewan	8	1165
464.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pembibitan	8	1295
465.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan	8	1165
466.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Tempat Pelelangan Ikan	8	1295
467.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Benih Ikan Lokal	8	1165
468.	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1295
469.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	8	1165
470.	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM	8	1295
471.	Kepala Seksi Fasilitasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	8	1295
472.	Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri	8	1295
473.	Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan	8	1295
474.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pasar	8	1295
475.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	8	1295
476.	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	8	1165
477.	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	8	1295
478.	Kepala Seksi Kelahiran	8	1165
479.	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	8	1165
480.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	8	1295
481.	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	8	1295
482.	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	8	1165
483.	Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	8	1295

484.	Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Lingkungan	8	1165
485.	Kepala Seksi Limbah B3	8	1295
486.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	8	1295
487.	Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan	8	1295
488.	Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan	8	1295
489.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan	8	1165
490.	Kepala Seksi Promosi Kepariwisataan	8	1165
491.	Kepala Seksi Sarana Promosi Kepariwisataan	8	1295
492.	Kepala Seksi Analisa Data dan Informasi	8	1165
493.	Kepala Seksi Layanan Kepemudaan	8	1295
494.	Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	8	1165
495.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	8	1165
496.	Kepala Seksi Pelayanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	8	1295
497.	Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan	8	1295
498.	Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan	8	1165
499.	Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan	8	1165
500.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	8	1295
501.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	8	1165
502.	Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik	8	1165
503.	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media	8	1295
504.	Kepala Seksi Layanan e-Government	8	1165
505.	Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian	8	1295
506.	Kepala Seksi Statistik	8	1295
507.	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional	8	1295
508.	Kepala Seksi Bina Lalu Lintas Angkutan	8	1295
509.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	8	1165
510.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan	8	1295
511.	Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran	8	1295
512.	Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan Daerah	8	1295
513.	Kepala Seksi Akuntansi Pengeluaran	8	1165
514.	Kepala Seksi Penilaian dan Penghapusan Aset	8	1165
515.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1295
516.	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan	8	1295
517.	Kepala Seksi Ekonomi	8	1165
518.	Kepala Seksi Sosial dan Budaya	8	1295
519.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1295

520.	Kepala Seksi Pengembangan dan Sertifikasi	8	1295
521.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1295
522.	Kepala Seksi Pencegahan	8	1295
523.	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	8	1295
524.	Kepala Seksi Rekonstruksi	8	1165
525.	Kepala Seksi Rehabilitasi	8	1295
526.	Kepala Seksi Logistik	8	1165
	KECAMATAN RANGKUI		
527.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1190
528.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	8	1320
529.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	1190
530.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1190
531.	Kepala Seksi TRANTIBUM	8	1320
	KECAMATAN GERUNGGANG		
532.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	1320
533.	Kepala Seksi TRANTIBUM	8	1190
	KECAMATAN BUKIT INTAN		
534.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1320
535.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	8	1320
536.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	8	1320
537.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	1190
538.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1190
539.	Kepala Seksi TRANTIBUM	8	1190
	KECAMATAN GABEK		
540.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1320
541.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	8	1320
542.	Kepala Seksi TRANTIBUM	8	1190
	KECAMATAN PANGKALBALAM		
543.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	8	1320
544.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1320
545.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	1190
546.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1190
	KECAMATAN TAMAN SARI		
547.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1190
548.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	8	1320
549.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1190
550.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	1190
551.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	1320
	KECAMATAN GIRIMAYA		
552.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1320
553.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	8	1320
554.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1320

555.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	1190
556.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1190
557.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	1190
	KELURAHAN MASJID JAMIK		
558.	Sekretaris Kelurahan Masjid Jamik	8	1320
559.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1165
560.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
561.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN PINTU AIR		
562.	Sekretaris Kelurahan Pintu Air	8	1320
563.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1165
564.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1295
565.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1165
	KELURAHAN ASAM		
566.	Sekretaris Kelurahan Asam	8	1320
567.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
568.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1295
569.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN KERAMAT		
570.	Sekretaris Kelurahan Keramat	8	1320
571.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
572.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1295
573.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN BINTANG		
574.	Sekretaris Kelurahan Bintang	8	1320
575.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
576.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
577.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN MELINTANG		
578.	Sekretaris Kelurahan Melintang	8	1320
579.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
580.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
581.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN PARIT LALANG		
582.	Sekretaris Kelurahan Parit Lalang	8	1320
583.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
584.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
585.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN GAJAH MADA		
586.	Sekretaris Kelurahan Gajah Mada	8	1320
587.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
588.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
589.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN TUA TUNU INDAH		
590.	Sekretaris Kelurahan Tua Tunu Indah	8	1320
591.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
592.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165

593.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN BUKIT MERAPIN		
594.	Sekretaris Kelurahan Bukit Merapin	8	1320
595.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
596.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
597.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN KACANG PEDANG		
598.	Sekretaris Kelurahan Kacang Pedang	8	1320
599.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
600.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
601.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1165
	KELURAHAN BUKIT SARI		
602.	Sekretaris Kelurahan Bukit Sari	8	1320
603.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
604.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
605.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1165
	KELURAHAN TAMAN BUNGA		
606.	Sekretaris Kelurahan Taman Bunga	8	1320
607.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
608.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
609.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1165
	KELURAHAN AIR KEPALA TUJUH		
610.	Sekretaris Kelurahan Air Kepala Tujuh	8	1320
611.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
612.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1295
613.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN AIR ITAM		
614.	Sekretaris Kelurahan Air Itam	8	1320
615.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
616.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1295
617.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1165
	KELURAHAN BACANG		
618.	Sekretaris Kelurahan Bacang	8	1320
619.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1165
620.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1295
621.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN SEMABUNG LAMA		
622.	Sekretaris Kelurahan Semabung Lama	8	1320
623.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1165
624.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1295
625.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1165
	KELURAHAN PASIR PUTIH		
626.	Sekretaris Kelurahan Pasir Putih	8	1320
627.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
628.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1295
629.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1165
	KELURAHAN TEMBERAN		

630.	Sekretaris Kelurahan Temberan	8	1320
631.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
632.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1295
633.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN SINAR BULAN		
634.	Sekretaris Kelurahan Sinar Bulan	8	1320
635.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
636.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
637.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN AIR MAWAR		
638.	Sekretaris Kelurahan Air Mawar	8	1320
639.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
640.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
641.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN SELINDUNG		
642.	Sekretaris Kelurahan Selindung	8	1320
643.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1165
644.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
645.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN SELINDUNG BARU		
646.	Sekretaris Kelurahan Selindung Baru	8	1320
647.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
648.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1295
649.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN GABEK SATU		
650.	Sekretaris Kelurahan Gabek Satu	8	1320
651.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
652.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
653.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN GABEK DUA		
654.	Sekretaris Kelurahan Gabek Dua	8	1320
655.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
656.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
657.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN AIR SALEMBA		
658.	Sekretaris Kelurahan Air Salemba	8	1320
659.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1165
660.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1295
661.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1165
	KELURAHAN JERAMBAH GANTUNG		
662.	Sekretaris Kelurahan Jerambah Gantung	8	1320
663.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
664.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
665.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN REJOSARI		
666.	Sekretaris Kelurahan Rejosari	8	1320
667.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295

668.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1295
669.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1165
	KELURAHAN KETAPANG		
670.	Sekretaris Kelurahan Ketapang	8	1320
671.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
672.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
673.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1165
	KELURAHAN AMPUI		
674.	Sekretaris Kelurahan Ampui	8	1320
675.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1165
676.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
677.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1165
	KELURAHAN PASIR GARAM		
678.	Sekretaris Kelurahan Pasir Garam	8	1320
679.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
680.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
681.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN LONTONG PANCUR		
682.	Sekretaris Kelurahan Lontong Pancur	8	1320
683.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
684.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
685.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1165
	KELURAHAN GEDUNG NASIONAL		
686.	Sekretaris Kelurahan Gedung Nasional	8	1320
687.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1165
688.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1295
689.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN KEJAKSAAN		
690.	Sekretaris Kelurahan Kejaksaan	8	1320
691.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1165
692.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
693.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN BATIN TIKAL		
694.	Sekretaris Kelurahan Batin Tikal	8	1320
695.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
696.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
697.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN RAWA BANGUN		
698.	Sekretaris Kelurahan Rawa Bangun	8	1320
699.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
700	Kepala Seksi Pembangunan	8	1295
701	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1165
	KELURAHAN OPAS INDAH		
702.	Sekretaris Kelurahan Opas Indah	8	1320
703.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
704.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
705	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295

	KELURAHAN PASAR PADI		
706.	Sekretaris Kelurahan Pasar Padi	8	1320
707.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1165
708.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
709.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1165
	KELURAHAN BATU INTAN		
710.	Sekretaris Kelurahan Batu Intan	8	1320
711.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
712.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1295
713.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1295
	KELURAHAN BUKIT BESAR		
714.	Sekretaris Kelurahan Bukit Besar	8	1320
715.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1165
716.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
717.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1165
	KELURAHAN SRIWIJAYA		
718.	Sekretaris Kelurahan Sriwijaya	8	1320
719.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
720.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1165
721.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1165
	KELURAHAN SEMABUNG BARU		
722.	Sekretaris Kelurahan Semabung Baru	8	1320
723.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan TRANTIBUM	8	1295
724.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1295
725.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum	8	1165

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 71 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020
TENTANG : KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

KELAS DAN NILAI JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PANGKALPINANG

NO	JABATAN PIMPINAN TINGGI	KELAS	NILAI JABATAN
1.	Dokter Utama	14	2805
2.	Dokter Gigi Utama	14	2805
3.	Dokter Madya	12	2225
4.	Dokter Gigi Madya	12	2225
5.	Auditor Madya	11	1930
6.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Madya	11	1930
7.	Pengawas Sekolah Madya	11	1960
8.	Penilik Madya	11	1930
9.	Guru Madya	11	1960
10.	Apoteker Madya	11	1945
11.	Sanitarian Madya	11	1930
12.	Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	1930
13.	Pengawas Bibit Ternak Madya	11	1930
14.	Dokter Muda	10	1720
15.	Dokter Gigi Muda	10	1670
16.	Auditor Muda	9	1355
17.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	9	1355
18.	Penilik Muda	9	1355
19.	Guru Muda	9	1385
20.	Dokter Pertama	9	1570
21.	Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	1355
22.	Dokter Gigi Pertama	9	1370
23.	Sanitarian Muda	9	1370
24.	Apoteker Muda	9	1370
25.	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1355
26.	Perawat Muda	9	1385
27.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1385
28.	Nutrisionis Muda	9	1555

29.	Penyuluh Pertanian Muda	9	1385
30.	Pustakawan Muda	9	1355
31.	Pranata Komputer Muda	9	1355
32.	Auditor Pertama	8	1280
33.	Pranata Komputer Pertama	8	1280
34.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	8	1280
35.	Analis Kepegawaian Pertama	8	1280
36.	Guru Pertama	8	1280
37.	Arsiparis Pertama	8	1280
38.	Bidan Penyelia	8	1230
39.	Perawat Gigi Penyelia	8	1260
40.	Perawat Penyelia	8	1260
41.	Nutrisionis Penyelia	8	1230
42.	Sanitarian Penyelia	8	1245
43.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1230
44.	Nutrisionis Pertama	8	1280
45.	Apoteker Pertama	8	1295
46.	Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	1280
47.	Perawat Pertama	8	1310
48.	Bidan Pertama	8	1280
49.	Administrator Kesehatan Pertama	8	1280
50.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1310
51.	Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1280
52.	Sanitarian Pertama	8	1295
53.	Asisten Apoteker Penyelia	8	1245
54.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	1280
55.	Fisioterapis Penyelia	8	1230
56.	Fisikawan Medis Pertama	8	1280
57.	Penata Anestesi Pertama	8	1340
58.	Asisten Penata Anestesi Penyelia	8	1290
59.	Perekam Medis Penyelia	8	1260
60.	Radiografer Penyelia	8	1260
61.	Refarksionis Optisien Penyelia	8	1260
62.	Teknisi Elektromedis Penyelia	8	1260
63.	Pengantar Kerja Pertama	8	1280
64.	Mediator Hubungan Industrial Pertama	8	1280
65.	Penyuluh Pertanian Pertama	8	1310
66.	Pengawas Bibit Ternak Pertama	8	1280
67.	Medik Veteriner Pertama	8	1280
68.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama	8	1295
69.	Penera Pertama	8	1280

70.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama	8	1310
71.	Pustakawan Pertama	8	1280
72.	Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1005
73.	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1020
74.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1005
75.	Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1005
76.	Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1035
77.	Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1020
78.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	1035
79.	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1035
80.	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	1005
81.	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1020
82.	Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	1005
83.	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	1005
84.	Asisten Penata Anestesi Mahir	7	1015
85.	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1035
86.	Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	1035
87.	Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	7	1035
88.	Instruktur Pelaksana Lanjutan	7	1005
89.	Penera Pelaksana Lanjutan	7	1005
90.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana Lanjutan	7	1035
91.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1005
92.	Sandiman Pelaksana Lanjutan	7	1005
93.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	7	1035
94.	Arsiparis Pelaksana	6	740
95.	Auditor Pelaksana	6	740
96.	Pranata Komputer Pelaksana	6	740
97.	Penyuluh KB Pelaksana	6	835
98.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	740
99.	Bidan Pelaksana	6	740
100.	Perawat Gigi Pelaksana	6	770
101.	Nutrisionis Pelaksana	6	740
102.	Sanitarian Pelaksana	6	755
103.	Asisten Apoteker Pelaksana	6	755
104.	Perawat Pelaksana	6	770
105.	Fisioterapis Pelaksana	6	740
106.	Perekam Medis Pelaksana	6	770
107.	Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770
108.	Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	770

109.	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana	6	740
110.	Penera Pelaksana	6	740
111.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana	6	770
112.	Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana	6	770
113.	Pustakawan Pelaksana	6	740
114.	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	505

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 71 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020
TENTANG : KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

KELAS DAN NILAI JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PANGKALPINANG

NO	JABATAN PIMPINAN TINGGI	KELAS	NILAI JABATAN
1.	Analis Kerja Sama	7	890
2.	Analis Kerjasama Lembaga Keagamaan	7	890
3.	Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	890
4.	Analis Produk Hukum	7	890
5.	Analis Hukum	7	890
6.	Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	7	890
7.	Analis Permasalahan Hukum	7	890
8.	Analis Perekonomian	7	890
9.	Analis Pengusahaan dan Pelayanan	7	890
10.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	890
11.	Analis Berita	7	890
12.	Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7	890
13.	Analis Protokol	7	890
14.	Penata Laporan Keuangan	7	890
15.	Bendahara	7	890
16.	Analis Kelembagaan	7	890
17.	Analis Tata Laksana	7	890
18.	Analis Jabatan	7	890
19.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
20.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	890
21.	Analis Publikasi	7	890
22.	Analis Materi Sidang	7	890
23.	Penyusun Naskah	7	890
24.	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
25.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
26.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
27.	Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	7	890
28.	Analis Rencana Program dan Kegiatan	7	890

29.	Penyusun Laporan Keuangan	7	890
30.	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	7	890
31.	Penyusun Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	7	890
32.	Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	7	890
33.	Analis Pengembangan Sistem Pembelajaran	7	890
34.	Analis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	7	890
35.	Analis Data Akademik	7	890
36.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
37.	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	890
38.	Pengembang Sarana dan Prasarana	7	890
39.	Analis Data dan Informasi	7	890
40.	Analis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	890
41.	Analis Pelayanan Sosial	7	890
42.	Analis Rehabilitasi Masalah Sosial	7	890
43.	Penyuluh Bimbingan atau Konseling Eks Penyandang Penyakit Sosial	7	890
44.	Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis	7	890
45.	Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial	7	890
46.	Penyuluh Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	7	890
47.	Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	7	890
48.	Pengawas Perempuan dan Anak	7	890
49.	Analis Gizi	7	890
50.	Analis Penyakit Menular	7	890
51.	Analis Penilaian dan Akreditasi	7	890
52.	Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga	7	890
53.	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	890
54.	Analis Humas	7	890
55.	Analis Kesehatan	7	890
56.	Analis Pembayaran Jaminan Kesehatan	7	890
57.	Pemeriksa Sanitasi	7	890
58.	Analis Jalan Jembatan	7	890
59.	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	890
60.	Analis Pengembangan Infrastruktur	7	890
61.	Analis Infrastruktur	7	890
62.	Pengawas Bangunan dan Gedung	7	890
63.	Analis Sumber Daya Air	7	890
64.	Analis Tata Ruang	7	890

65.	Pengawas Tata Ruang	7	890

66.	Analis Penataan Kawasan	7	890
67.	Analis Hasil Penanganan Pelanggaran	7	890
68.	Analis Keamanan	7	890
69.	Analis Pengembangan Potensi Daerah	7	890
70.	Analis Dokumen Perizinan	7	890
71.	Penyuluh Kesehatan dan Keselamatan Kerja	7	890
72.	Analis Pangan	7	890
73.	Analis Budidaya Perikanan	7	890
74.	Analis Pendaftaran Kapal Perikanan	7	890
75.	Analis Koperasi	7	890
76.	Analis Perdagangan	7	890
77.	Penilai Pelayanan Kemetrologian	7	890
78.	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar	7	890
79.	Analis Data dan Informasi	7	890
80.	Analis Perencanaan dan Evaluasi Program	7	890
81.	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	890
82.	Analis Barang Milik Negara	7	890
83.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	7	890
84.	Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	7	890
85.	Analis Objek Wisata	7	890
86.	Analis Pariwisata	7	890
87.	Penyuluh Wisata	7	890
88.	Pengawas Kepariwisataan	7	890
89.	Analis Keolahragaan	7	890
90.	Penyuluh Perpustakaan	7	890
91.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
92.	Pengawas Teknologi Informasi	7	890
93.	Analis Penerapan Aplikasi dan Konten	7	890
94.	Penelaah Standar Telekomunikasi	7	890
95.	Pemeriksa Lalu Lintas Darat	7	890
96.	Penyusun Rekayasa Lalu Lintas	7	890
97.	Analis Kebutuhan Perlengkapan Jalan	7	890
98.	Penyusun Kebutuhan Perlengkapan Jalan	7	890
99.	Pengawas Terminal	7	890
100.	Pengamat Teknika	7	890
101.	Analis Bahan Pengesahan Sertifikat Registrasi Uji Tipe	7	890
102.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	7	890
103.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890

104.	Penata Keuangan	7	890
105.	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	7	890
106.	Analis Pajak Daerah	7	890
107.	Analis Penagihan Pajak	7	890
108.	Analis Rancangan Naskah Perjanjian	7	890
109.	Analis Perencanaan	7	890
110.	Analis Infrastruktur	7	890
111.	Analis Pengembangan Wilayah	7	890
112.	Analis Lingkungan Hidup	7	890
113.	Analis Diklat	7	890
114.	Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
115.	Penyusun Program Laporan Data Pengungsi	7	890
116.	Analis Perencanaan Pembinaan Kesatuan Bangsa	7	890
117.	Analis Wawasan Kebangsaan	7	890
118.	Analis Peraturan Administrasi	7	890
119.	Analis Pemberdayaan Masyarakat	7	890
120.	Analis Pembangunan	7	890
121.	Analis Desa dan Kelurahan	7	890
122.	Analis Pelayanan	7	890
123.	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6	690
124.	Pranata Acara	6	690
125.	Pengelola Data	6	690
126.	Pengelola Barang Milik Negara	6	690
127.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	690
128.	Pengelola Kepegawaian	6	690
129.	Verifikator Keuangan	6	690
130.	Pranata Kearsipan	6	690
131.	Pengolah Data Sistem Informasi Perbendaharaan	6	690
132.	Pengelola Gaji	6	690
133.	Pengolah Data	6	690
134.	Pengelola Pemetaan Mutu Pendidikan	6	690
135.	Pengelola Informasi Akademik	6	690
136.	Pengelola Data Pemanfaatan Cagar Budaya dan Koleksi Museum	6	690
137.	Pengelola Data Kesenian dan Perfilman	6	690
138.	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	6	690
139.	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	6	690
140.	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	690
141.	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	6	690

142.	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	6	690
143.	Pengelola Program Gizi	6	690
144.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
145.	Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan	6	690
146.	Pengelola Program Imunisasi	6	690
147.	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	690
148.	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	6	690
149.	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	6	690
150.	Pengelola Bahan Pelayanan Teknis Ketenagakerajaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	6	690
151.	Pengelola Keuangan	6	690
152.	Pengelola Pendapatan	6	690
153.	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	6	690
154.	Pengelola Rujukan Kesehatan	6	690
155.	Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	6	690
156.	Pranata Laporan Keuangan	6	690
157.	Pengelola Perencanaan Teknik Tata Bangunan	6	690
158.	Pengelola Geologi, Tata Lingkungan dan Air Bawah Tanah	6	690
159.	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	690
160.	Pengolah Data Survei, Pengukuran dan Pemetaan	6	690
161.	Teknisi Elektronik	6	690
162.	Pengelola Data Laporan Keuangan	6	690
163.	Pengelola Dokumen Perizinan	6	690
164.	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	6	690
165.	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	6	690
166.	Pengelola Pemasaran	6	690
167.	Pengolah Data Pelayanan	6	690
168.	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	6	690
169.	Pengelola Penataan Sampah	6	690
170.	Pranata Reproduksi Arsip	6	690
171.	Pengelola Sarana Wisata	6	690
172.	Penata Liputan	6	690
173.	Verifikator Pajak	6	690
174.	Pengelola Retribusi Daerah	6	690
175.	Pengelola Rencana Penelitian Pengembangan	6	690
176.	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	6	690
177.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
178.	Pengolah Data Seleksi dan Penempatan Beasiswa	6	690
179.	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	690

180.	Pengelola Data Dampak Bencana	6	690
181.	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690
182.	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690
183.	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490
184.	Pengadministrasi Umum	5	490
185.	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	490
186.	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	5	490
187.	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
188.	Pengadministrasi Persuratan	5	490
189.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490
190.	Pengadministrasi Keuangan	5	490
191.	Operator Mesin	5	490
192.	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	5	490
193.	Pengadministrasi Rapat	5	490
194.	Petugas Penggandaan	5	490
195.	Pengadministrasi Anggaran	5	490
196.	Pengadministrasi Gudang Farmasi	5	490
197.	Pengadministrasi Penerimaan	5	490
198.	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	490
199.	Pranata Jamuan	5	490
200.	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	5	490
201.	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	490
202.	Pemelihara Jalan	5	490
203.	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	5	490
204.	Juru Survei Permukiman Perumahan	5	490
205.	Pranata Taman	5	490
206.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490
207.	Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan	5	490
208.	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	5	490
209.	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat	5	490
210.	Komandan Petugas Keamanan	5	490
211.	Pranata Perlindungan Masyarakat	5	490
212.	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	490
213.	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	5	490
214.	Pengadministrasi Perizinan	5	490
215.	Pengadministrasi Izin Usaha	5	490
216.	Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir	5	490
217.	Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan	5	490
218.	Pengadministrasi Perpustakaan	5	490
219.	Pemelihara Kendaraan	5	490
220.	Pengadministrasi LLAJ	5	490

221.	Teknisi Survei Lalu Lintas Jalan	5	490
222.	Operator Terminal	5	490
223.	Pengadministrasi Pajak	5	490
224.	Pengadministrasi Pelatihan	5	490
225.	Pengadministrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	5	490
226.	Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	5	490
227.	Pengemudi Ambulan	4	440
228.	Pengemudi	3	340
229.	Petugas Keamanan	3	340
230.	Binatu Rumah Sakit	3	340
231.	Juru Pungut Kebersihan	3	340
232.	Pramu Kebersihan	1	190

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL